

Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang

Analysis of the Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Serang City

Muhammad Akbar Maulana

Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 1-9
Diterbitkan : 01 Juli 2025

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Serang, dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta sistem pemerintahan lainnya, termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Namun, implementasi SIPD di Kota Serang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kualitas sistem yang belum optimal serta efisiensi waktu dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang terbatas, sehingga banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terbiasa menggunakan SIPD secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang telah mengimplementasikan aplikasi SIPD untuk mendukung kebijakan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, SIPD berfungsi sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan lainnya, termasuk mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaan SIPD yang memerlukan peningkatan kualitas sistem dan efektivitas pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Implementasi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Abstract

The Regional Government Information System (SIPD) is a system used by local governments, including the Serang City Government, for regional development planning, regional financial management, and other government systems, including regional government supervision and guidance. However, the implementation of SIPD in Serang City still faces various challenges, particularly regarding the system's suboptimal quality and the limited time allocated for technical guidance,

Korespondensi
No Handphone : 0812-1582-9119
E-mail : dosen02927@unpam.ac.id

resulting in many Regional Work Units (SKPD) not being fully accustomed to using SIPD effectively. This study aims to analyze the implementation of SIPD in Serang City. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The results show that the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Serang City has implemented the SIPD application to support policies in executing various government programs. Based on the information obtained, SIPD functions as a system for regional development planning, regional financial management, and other government systems, including mechanisms for regional government supervision and guidance. However, challenges remain in optimizing SIPD usage, necessitating improvements in system quality and the effectiveness of training for local government officials.

Keywords: Local Government, Serang City, Implementation, Effectiveness, Regional Financial Management.

Pendahuluan

Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah (Sandiasa & Agustana, 2017). Dengan perkembangan pesat teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk mengadopsi sistem berbasis digital guna meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang menggantikan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dengan berlakunya regulasi ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, diwajibkan untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pengganti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD berperan sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi terintegrasi (Nuriyanto, 2014).

Sebagai alat bantu digital dalam pengelolaan keuangan daerah, SIPD memiliki beberapa fungsi strategis, antara lain sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sebagai platform pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah. Implementasi SIPD di Kota Serang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi administrasi keuangan daerah dengan menyediakan informasi yang valid, akurat, serta terintegrasi secara nasional (Kusuma & Nugroho, 2021). Namun, dalam praktiknya, penggunaan SIPD masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada tahap awal penerapannya, BPKAD Kota Serang menghadapi sejumlah permasalahan dalam implementasi SIPD. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas sistem yang memerlukan pengisian data secara menyeluruh dan sistematis.

Banyaknya menu serta fitur dalam SIPD sering kali menyebabkan pegawai mengalami kesulitan dalam proses penginputan data, yang berakibat pada ketidaksesuaian laporan keuangan, tertundanya pergeseran anggaran, serta terhambatnya sistem penggajian pegawai (Rahmawati, 2022). Selain itu, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan sistem yang sering mengalami error turut menghambat penyusunan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Mengingat pentingnya SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD di Kota Serang serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaannya (Erman, 2004). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang serta mengoptimalkan sistem informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan menggambarkan data secara mendalam dalam bentuk tulisan atau visual, bukan angka-angka kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2019), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memahami realitas sosial berdasarkan perspektif individu yang terlibat secara langsung dalam suatu fenomena (Moleong, 2019).

Penelitian ini berfokus pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Serang, dengan menelaah bagaimana sistem ini diterapkan dalam tata kelola keuangan daerah. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab dalam penerapan SIPD di Kota Serang. Informan tersebut meliputi:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang
2. Ketua Bidang Anggaran BPKAD Kota Serang

Fokus penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti dalam menentukan batasan penelitian serta mengarahkan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Serang. Untuk menganalisis implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengidentifikasi enam variabel utama dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan yang mengacu pada ukuran dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
2. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, keuangan, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam melihat struktur organisasi, koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan.
4. Komunikasi antarorganisasi dalam menilai efektivitas komunikasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana dalam mencermati bagaimana sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Regulasi ini diperkuat oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang mengamanatkan integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya keterpaduan data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD menjadi landasan utama dalam implementasi sistem informasi pemerintahan daerah.

Selain regulasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerbitkan beberapa kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.

SIPD sendiri dirancang untuk menyediakan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyinergikan kebijakan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dengan implementasi di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, sehingga dapat mendorong pemerintahan yang lebih inovatif dan responsif.

Meskipun harapan besar telah disematkan pada implementasi SIPD, kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam penginputan data, yang sering kali disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal serta keterbatasan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, agar sistem ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan kesiapan yang matang dari setiap perangkat daerah, baik dalam aspek kompetensi SDM maupun sarana dan prasarana pendukung. Jika perangkat daerah tidak responsif terhadap perkembangan ini, maka implementasi SIPD dapat terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Serang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. SIPD, yang dirancang untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan, keuangan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, menjadi alat vital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Serang mulai menginput data pembangunan menggunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Asisten Daerah II Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Adjat Gunawan, menyatakan bahwa aplikasi SIPD berbasis web menjadi kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi data, memudahkan, serta mempercepat proses pembaruan dan pencarian data.

Implementasi SIPD di Kota Serang tidak terlepas dari tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Amanah (2018) menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Serang telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan SIPD. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur teknologi informasi juga terus dilakukan guna mendukung operasionalisasi SIPD secara efektif.

Salah satu indikator keberhasilan implementasi SIPD di Kota Serang adalah penghargaan yang diraih sebagai Terbaik Kedua dalam Pembinaan Pengelolaan SIPD Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Banten. Penghargaan ini mencerminkan soliditas dan komitmen Pemerintah Kota Serang dalam mengelola SIPD secara efektif dan efisien.

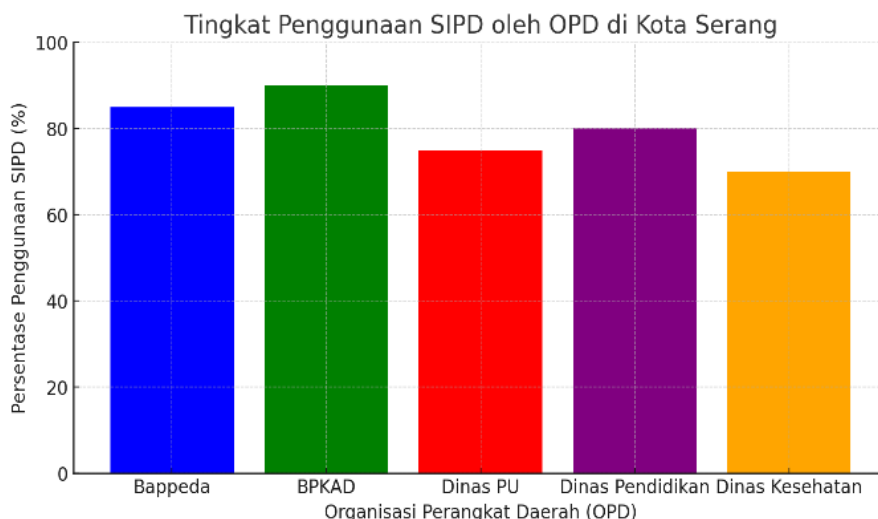
Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Evaluasi berkala dan umpan balik dari pengguna SIPD di berbagai satuan kerja perangkat daerah perlu terus dilakukan untuk memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah. Selain itu, integrasi data antar sektor dan konsistensi dalam penginputan data menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antar organisasi perangkat daerah untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam SIPD akurat, up-to-date, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi SIPD di Kota Serang sejalan dengan upaya nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Ke depan, keberhasilan implementasi SIPD di Kota Serang akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik dari pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat. Partisipasi aktif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem informasi pemerintahan yang handal dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang berarti, implementasi SIPD di Kota Serang masih memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut beberapa aspek penting dari implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Serang.

Garifk 1. Tingkat Penggunaan SIPD oleh OPD di Kota Serang



Grafik di atas menunjukkan tingkat penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Serang. BPKAD memiliki tingkat penggunaan tertinggi (90%), sementara Dinas Kesehatan masih berada di angka 70%, yang menunjukkan perlunya optimalisasi lebih lanjut.

Grafik 2. Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPD



Grafik ini menunjukkan peningkatan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis SIPD di Kota Serang dari tahun 2021 hingga 2024. Terjadi tren peningkatan signifikan, dengan jumlah pelatihan bertambah dari 5 kali pada tahun 2021 menjadi 12 kali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait implementasi SIPD.

2. Analisis Implementasi SIPD Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menjadi kerangka konseptual dalam menilai efektivitas penerapan SIPD di Kota Serang. Model ini mencakup enam variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar dan sasaran yang ditetapkan. Dalam

konteks penelitian ini, BPKAD Kota Serang telah mengadopsi SIPD sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, sebagai sistem yang masih relatif baru, SIPD masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Seiring berjalannya waktu, sistem ini diharapkan terus diperbaiki dan diperbarui agar mampu mencapai standar yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Menurut Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1975), keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial, dapat menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan. Keberhasilan SIPD di Kota Serang sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas operator SIPD di BPKAD Kota Serang adalah pegawai muda yang memiliki keterampilan teknologi informasi yang baik. Namun, perlu adanya strategi yang lebih sistematis untuk mengatasi potensi kendala, terutama dalam proses pergantian kepemimpinan dan regenerasi sumber daya manusia.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana memiliki peran kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi SIPD, BPKAD Kota Serang bertindak sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas penerapan sistem ini. Agar kebijakan dapat berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang baik antar unit kerja serta dengan pemerintah pusat. Selain itu, kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan SIPD.

d. Komunikasi Antarorganisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007), efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten antara pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, komunikasi antara BPKAD Kota Serang dengan pemerintah pusat dan instansi terkait menjadi aspek yang perlu diperkuat. Koordinasi yang efektif dapat mengurangi kendala dalam integrasi data serta mempercepat penyelesaian permasalahan teknis yang muncul selama penerapan SIPD.

e. Disposisi dan Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Menurut Agostino (2006), penerimaan atau penolakan oleh agen pelaksana dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dalam kasus Kota Serang, keberlanjutan implementasi SIPD sangat bergantung pada kesiapan mental dan komitmen pegawai dalam mengadaptasi sistem baru ini. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan data, pemerintah daerah diharapkan terus berupaya memperbaiki sistem agar dapat lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

f. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Lingkungan eksternal juga berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Kota Serang menjadi faktor yang mendukung kelancaran penerapan SIPD. Meskipun terdapat tantangan dalam dinamika pemerintahan daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap perlu dijaga agar implementasi SIPD dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Implementasi SIPD di Kota Serang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Dengan adanya strategi yang tepat dalam penguatan sumber daya manusia,

peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang telah mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari implementasi kebijakan dalam mendukung berbagai program pemerintahan daerah. Penggunaan SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, SIPD berperan sebagai sistem terpadu yang mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Implementasi SIPD di Kota Serang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan teknis dan non-teknis yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan agar BPKAD Kota Serang meningkatkan intensitas bimbingan teknis bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menggunakan SIPD guna memastikan bahwa setiap pengguna sistem memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi ini. Selain itu, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi SIPD berjalan secara efektif dan efisien. Alokasi anggaran yang memadai serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat perlu diperkuat guna mendukung keberlanjutan sistem ini. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait implementasi SIPD di daerah lain. Penelitian mendatang juga dapat memperdalam analisis terhadap efektivitas SIPD dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya dengan mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah di Kota Serang.

Daftar Pustaka

- Agostino, D. (2006). *Public Sector Performance: A Conceptual Turn*. Public Administration Review, 66(1), 19-30.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: Wiley.
- Derthicks, M. (1975). *New Towns in In-Town: Why a Federal Program Failed*. The Brookings Institution.
- Erman, I. R. (2004). *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"? *Konstitusi*, 11(3), 429–253.
- Sandiasa, I. P. A., & Agustana, I. P. (2017). *Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 1-10.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Proses Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.